

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu pajak yang merupakan penerimaan Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan pada mereka yang mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia sudah termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanah atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.

Pengelolaan pajak bumi dan bangunan diatur pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Bumi dan Bangunan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan. PBB merupakan pajak pusat yang dikelola secara bersama-sama Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Bumi dan bangunan merupakan objek pajak yang potensial, karena bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi lebih baik bagi orang yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak. Bahkan saat ini Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah diserahkan pengelolaanya kepada pemerintah daerah.

Dengan adanya pertumbuhan penduduk dan pendataan yang mendorong pesatnya pembangunan, maka akan cepat juga perubahan keadaan objek pajak bumi dan bangunan, dengan demikian data yang adapun berubah. Melalui pendataan ini pula diharapkan adanya penyempurnaan data pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan sarana tertib administrasi pada umumnya dan untuk meningkatkan jumlah ketetapan pokok ketetapan pajak bumi dan bangunan pada khususnya. Pendataan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan. Verifikasi data objek pajak bumi dan bangunan cara ini diharapkan merupakan alternatif yang tepat untuk diterapkan diwilayah tertentu, sehingga dapat meliputi atau merekam perubahan-perubahan data akibat adanya perubahan penduduk dan pendataan. Oleh karena itu peliputan atau pendaftaran atau pengevaluasian data-data objek pajak serta dasar pengenaan pajak yang tersedia, perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus, agar data yang tersedia untuk memproses ketetapan pajak bumi dan bangunan dapat memberikan gambaran

yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam peraturan pajak bumi dan bangunan

Mengingat pentingnya pelaksanaan penetapan pokok ketetapan PBB-P2 sebagai dasar pengenaan besarnya PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak dimana nilai sangat berpengaruh dalam tingkat penerimaan PBB. hasil penerimaan PBB sangat berpengaruh dalam besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pemikiran dan masalah diatas penulis akan mengambil judul “ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN KETETAPAN POKOK PBB-P2 MELALUI PENDATAAN VERIFIKASI LAPANGAN OBJEK PBB-PP2 PADA UPPD DUREN SAWIT DAN UPPD KRAMAT JATI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, Penulis membatasi masalah yang sudah diidentifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pendataan pelaksanaan verifikasi lapangan PBB-P2 di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Duren Sawit dan UPPD Kramat Jati ?
2. Mengapa perlu diadakanya pelaksanaan pendataan dengan verifikasi lapangan data objek PBB-P2 di UPPD Duren Sawit dan UPPD Kramat Jati ?
3. Bagaimana pengaruh hasil verifikasi atas ketetapan PBB-P2 terhadap tingkat pendapatan daerah ?

4. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan data objek PBB-P2?

C. Ruang lingkup penelitian

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis membuat batasan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Analisis Pengaruh Pelaksanaan Ketetapan Pokok PBB-P2 Melalui Pendataan verifikasi Lapangan Objek PBB-PP2 Pada UPPD Duren Sawit dan UPPD Kramat Jati Terhadap Pendapatan Daerah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendataan pelaksanaan verifikasi lapangan PBB-P2 terhadap peningkatan objek PBB-P2 di UPPD Duren Sawit dan UPPD Kramat Jati
2. Untuk melihat seberapa besar tingkat kesadaran WP dalam membayar PBB untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah
3. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh hasil verifikasi PBB-P2 di UPPD Duren Sawit dan UPPD Kramat Jati terhadap tingkat pertumbuhan PAD.
4. Untuk mengetahui kendala apa saja yang sering dihadapi dilapangan dan memberikan saran alternatif untuk memecahkan masalah tersebut.

E. Manfaat penelitian

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat akan pentingnya dilakukan pedataan untuk memperoleh data yang akurat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan serta mendorong kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.
2. memberikan masukan bagi pemerintah untuk dapat melakukan koreksi atau perbaikan kerja terhadap kerja yang telah ditunjukkan selama ini, terutama yang berkaitan dalam tugas pendapatan dengan cara verifikasi data objek PBB sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan profesionalisme dan integritas seluruh aparat pajak untuk mencapai pokok ketetapan PBB-P2.

F. Sistematika penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing masing bab terdiri dari sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini diuraikan secara teoritis yang mendasari pembatasan skripsi. hal ini untuk memperoleh penjelasan antara teori dengan praktik yang diterapkan oleh pemerintah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini meliputi defenisi operasional, prosedur pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan sekilas tentang gambaran umum objek penelitian kemudian akan membahas apa yang telah ada dalam perumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis membuat kesimpulan-kesimpulan dari hasil Penelitian yang dilakukan memberikan saran atau rekomendasi dari temuan-temuan yang diperoleh.